



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHTARUDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 155600

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.180.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/49 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/36 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 100000 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/110 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah Seluas 379 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 319.650.000

1. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 11.150.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HR - V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 20.500.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.407.866

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.530.557.866

**III. HUTANG**

Rp. 501.145.683

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.029.412.183

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.